BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian menyangkut semua objek yang ada dan terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Disini yang menjadi objek adalah Sistem Informasi Pembayaran pajak kendaraan dan Kinerja Pegawai Samsat Tasikmalaya.

3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Perkembangan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya jawatan Perpajakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DT Jawa Barat. Dengan kepeutusan Gubenur Propinsi Jawa Barat Nomor : 219/Po/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.

Sebelum itu dengan keputusan Gubenur Propinsi Jawa Barat No: 60/PO/OM/SK/71 sudah dibentuk suatu biro Pendapatan dan Perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupakan embrio semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub ordinat dari administrator bidang Keuangan. Bidang Pendapatan dan Keuangan adalah suatu rumpun, ketika proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini akan dipecah menjadi disiplin fungsi sendiri.

Tugas pokok Jawatan adalah menyelenggarakan tugas-tugas dan kewenagan-kewenagan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bidang

Perpajakan Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, yang pelaksanaanya disesuaikan dengan peraturan perundangan Pemerintah Daerah Cq Gubenur. Pada awalnya susunan organisasi Jawatan terdiri dari unsure pimpinan yaitu kepala Jawatan dan unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian, kepala sub bagian , dan kepala seksi.

Sebagai konsekwensi berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun1974, maka sebutan atau nomenkelatur kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 nomenklatur jawatan diubah dengan Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Setelah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Propinsi Tingkat I Jawa Barat dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Perda Proinsi DT I Jawa Barat Nomor 7/DP.040/PD/78 tanggal 30 Agustus 1978 Tentang: Susunan Organisasi ini, eksistensi kantor-kantor perwakilan jawatan di setiap Wilayah ditiadakan sehingga organisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Unsur pimpinan adalah kepala dinas
2. Unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian tata usaha
3. Unsur pelaksanaan adalah sub dinas, cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis

Pada fase inilah terjadi kerancuan organisasi pada tingkat operasional dimana cabang dinas pembentukannya didasarkan pada kepeutusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 125/SK.L045/HUK/1982, sedangkan Unit Pelaksanaan Teknis (UPS) dibentuk dengan keputusan Gubenur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor :125/SK.1046/HUK/82 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis PKB dan BBBNKB pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat, yang memposisikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas, sedangkan kepada kepala cabang hanya bersifat administrative yaitu dalam hal peralatan, perbekalan,dan belanja rutin.

Peristiwa monumemtal yang terjadi saat itu adalah dilakukannya reformasi dalam system dan prosedur perpajakan Propinsi, diamana pada tahun 1978, dilaksanakan Sistem Administrasi Menunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) berdasarkan keputusan bersama 3 mentri yang secara prosedur administratif didasarkan pada surat ederan Mentri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 1977 tentang pedemon/Petunjuk pelaksaan SAMSAT dalam penegeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak-pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDLLJ).

3.1.2. VISI dan Misi

Visi SAMSAT

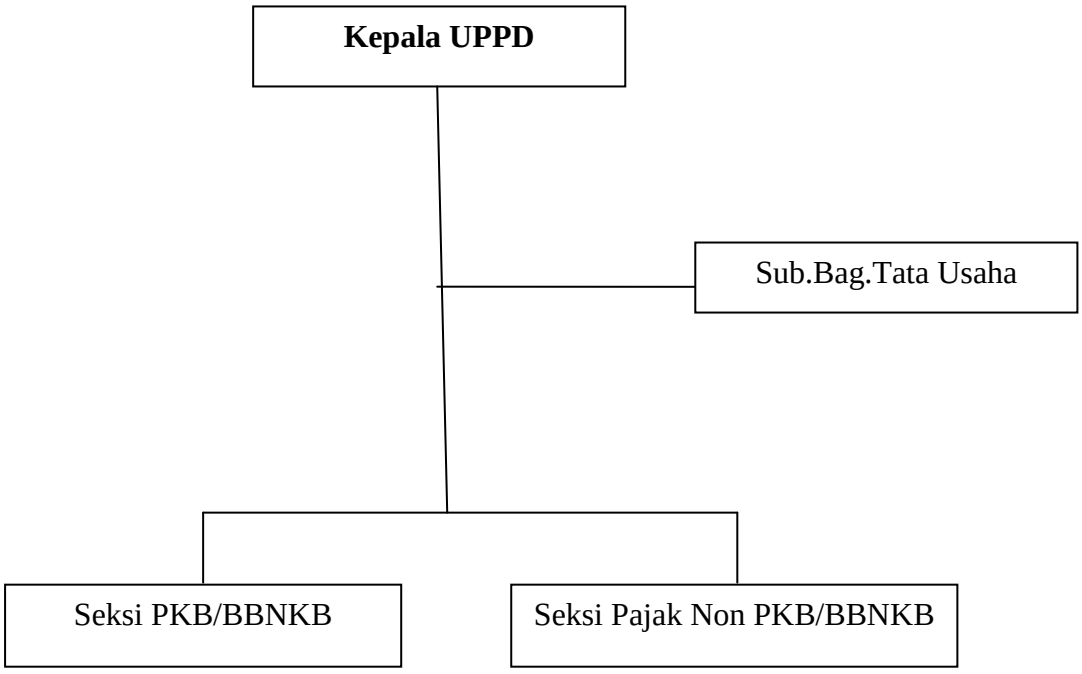
" Menjadikan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang amanah dengan berorientsi kepada kepuasaan pelayanan publik"

Misi SAMSAT

1. Meningkatkan kualitas pelayanan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyrakat

3. Memantapkan jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di Bidang Pendapatan Daerah

3.1.3. Struktur Organisasi



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXVII

(SAMSAT Tasikmalaya)

3.1.4. Deskripsi Tugas

3.1.4.1. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan mempunyai tugas pokok yaitu Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendataan daerah, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan teknisi operasional di bidang pendapatan daerah

2. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah
3. Memimpin mengatur dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan UPP
4. Menetapkan rencana kerja operasional tahunan sesuai dengan kebijakan teknis operasional Dinas
5. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepada kepala Dinas sebagai bahan kebijaksanaan
6. Menyelenggarakan pengaturan pelayanan umum bidang PKB/, pajak Non PKB/BBNKB dan non pajak serta pendapatan lain yang menjadi kewenangan Propinsi
7. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPP
8. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

3.1.4.2. Kepala Sub.Bagian Tata Usaha

Bagian Sub.Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan rencana kerja pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum dan pelaporan adapun fungsi Kepala Sub.Bagian Tata Usaha yaitu:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UPP
2. Pelaksanaan pengelolaan admistrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umun
3. Melaksanakan kegiatan dalam bidang ketatausahaan
4. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran

5. Melaksanakan pengelolaan di bidang kepegawaian, keuangan perlengkapan dan umum di lingkungan UPP
6. Memberikan saran dan atau pertimbangan tugas-tugas kedinasan
7. Mengumpulkan dan mengelola bahan laporan di bidang admistrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada kepala UPP untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut
8. Mengusahakan pengurusan rumah tangga UPP
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

3.1.4.3. Bagian Kepala seksi PKB/BBNKB

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB, dan bagian Kepala Seksi PKB/BBNKB mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut

1. Pelaksanaan pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaksanaan koordinasi tugas pelayanan di bidang pungutan PKB/BBNKB
3. Pengendalian tugas pelayanan di bidang pungutan PKB/BBNKB
4. Melaksanakan administrasi pendapatan dan pendataan penelitian, perhitungan dan penetapan, pembayaran, dan penyetoran dibidang pungutan PKB/BBNKB

5. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak mengenai besarnya PKB/BBNKB dan tata cara pelunasan pembayaran PKB/BBNKB
6. Menyusun rumusan guna penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan PKB/BBNKB dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar sebagaimana dimaksud poin 5 diatas.
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi PKB/BBNKB

3.1.4.4. Kepala Seksi Pajak Non PKB/BBNKB

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pelayanan pajak Non PKB/BBNKB, selain itu Kepala Seksi Pajak Non PKB/BBNKB mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Pelaksanaan pelayanan dibidang pajak Non PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pajak Non PKB/BBNKB
3. Pengendalian tugas pelayanan di bidang pajak Non PKB/BBNKB
4. Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pajak Non PKB/BBNKB
5. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian perhitungan dan penetapan, penegihan, pembayaran, dan penyetoran di bidang pungutan pajak Non PKB/BBNKB

6. Melaksnakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak mengenai besarnya pajak dan data cara pelunasan pembayaran pajak Non PKB/BBNKB
7. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan pajak Non PKB/BBNKB dan atas keberatann yang diajukan oleh wajib pajak Non PKB/BBNKB
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi pajak non PKB/BBNKB

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi metode apa-apa saja yang akan peneliti ambil untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan bagaimana cara mengolahnya agar didapatkan informasi atau hasil yang berkualitas serta valid dan reliabel. Menurut Husein Umar (2005:21) yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu secara benar. Sedangkan menurut Furchan (2004:39) metode penelitian ialah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.

Dari pengertian diatas, diperoleh bahwa metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik data primer mupun sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahaan sehingga akan didapat suatu kebenaran dari data yang diperoleh.

Dalam melaksanakan penelitian ini tahapan-tahapan yang penulis lakukan adalah

- Melakukan pengamatan secara tidak formal dalam rangka mengidentifikasi masalah yang ada
- Melakukan studi kepustakaan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara teori dengan masalah yanng ditemui.
- Merumuskan masalah, kerangka pemikiran dan hipotesis
- Merancang penelitian yang meliputi penentuan metode yang akan digunakan, menentukan kerangka sampling serta membuat alat ukur
- Mengumpulkan data lapangan
- Melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Jonathan Sarwono (2003:27) yang dimaksud dengan desain penelitian bagaikan alat penuntun bagi peneliti dalam melakukan proses penetuan instrument pengambilan data, penentlahuan sample, koleksi data dan analisisnya.

Dalam penelitian yang dilakukan pada kantor Samsat Tasikmlaya, metode yang dirancang adalah metode *hypothetico-deductive.* Metode ini adalah salah satu metode untuk mencari jawaban yang diperoleh dari proses deduksi. Deduksi adalah suatu proses dimana kita akan sampai kepada sebuah konklusi yang didasarkan pada generalisasi dan fakta yang diketahui (Bambang S. Soedibjo, 2005:14). Sedangkan jenis penelitian ini yang akan diambil adalah metode deskriptif dan asosiatif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, sedangkan metode asosiatif digunakan untuk

melihat hubungan antara dua atau lebih variabel (Bambang S. Soedibjo, 2005:7). Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai masing-masing variabel mandiri seperti yang ditunjukan dalam judul penelitian ini. Sedangkan metode asosiatif atau metode korelasional untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut. Penelitian ini merupakan kajian *cross-sectional* yaitu penelitian dilakukan pada suatu periode waktu tertentu

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2004:38), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Agar konsep variabel yang diajukan dalam penelitian dapat diukur maka perlu dilakukan variabel tersebut perlu didefinisikan telebih dahulu agar terdapat kesamaan persepsi dalam mengkaji konsep yang sedang diteliti. Definisi ini merupakan definisi kongkrit atau karateristik konsep atau kostruk yang akan diukur (Bambang S.Soedibjo, 2005:47)

Konsep yang diajukan dalam skripsi ini terdiri dari dua variabel. Variabel bebas (*independent)* dan variabel terikat/tidak bebas (*dependent*). Konsep yang diukur dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Variabel bebas (*independent*) adalah Sistem Informasi pembayaran pajak kendaraan (X) yang terdiri dari subvariabel X_1, X_2,
b. Variabel tidak bebas (*dependent*) adalah kinerja pegawai (Y)

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
Sistem informasi pelayanan pembayaran pajak(variabel independen)	kumpulan dari komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Dr. richardus Eko Indrajit (2000:3)	Keakuratan	1. Ketepatan dalam validasi data 2. Kemudahan sistem 3. Keakuratan data	Ordinal
		Kehandalan	4. Kecepatan sistem 5. Tanggap dan cepat 6. Kemampuan sistem yang dimiliki	Ordinal
		Keamanan.	7. Tingkat keamanan akses sistem	Ordinal

Kinerja pegawai (varibel dependent)	Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. (Anwar.P.M 2000:67)	Kualitas Kerja	1. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 2. Tingkat kemampuan dalam bekerja 3. kemampuan menganalisis data/informasi 4. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 5. Kemampuan memecahkan masalah 6. Kemampuan menevaluasi kesalahan.	Ordinal Ordinal
		Kuantitas Kerja	7. Lamanya melaksanakan pekerjaan atau waktu yang dipergunakan 8. Proses kerja dan kondisi pekerjaan 9. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja	ordinal

		Konsistensi Pegawai	10.Tingkat pengetahuan tentang job desk 11 Tingkat kemampuan mengikuti perkembangan IPTEK 12.Tingkat Keterampilan	
		Tanggung jawab	13.Pertanggung jawaban yang diberikan pada pekerjaan 14. Pertanggung jawaban terhadap sistem	Ordinal

3.2.3 Skala Pengukuran

Sedangkan dalam pengukuran suatu variabel skala merupakan salah satu untuk menglasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan analisis data dan menuntukan langkah penelitian selanjutnya. Tipe skala pengukuran yang peneliti ambil adalah skala likert's yaitu jenis skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial yang sedang berlangsung. Skala Likert yang digunakan berisi 1 sampai 5 dengan bobot nilai sebagai berikut

Tabel 3.2

Penilaian Pengukuran Skala Likert

Tingkatan Persetujuan	Pernyataan	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Cukup	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

3.2.4 Metode Penarikan Sampel

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai populasi yang akan diteliti sehingga dapat diperoleh keputusan apakah penelitian ini memerlukan sampel atau tidak dan bagaimana cara pengambilan sampel tersebut.

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya

Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah pegawai Samasat Tasikmalaya yang berjumlah 15 orang. Dengan harapan hasil penelitian relevan dengan fakta yang ada dan tidak ada kesalahan dalam proses menganalisa hasil

penelitian sehingga menjadi informasi penting bagi lingkungan intansi itu sendiri dan masyarakat.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:116), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi

3. Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus dimana menurut Marzuki (2002:41) sensus adalah mencatat semua elemen yang diselidiki. Jadi menyelidiki semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, dan yang dihasilkan adalah nilai karakteristik sesungguhnya (*true value*). Cara sensus yaitu perhitungan yang lengkap (*a complete enumeration method*). Pertimbangan sensus karena ukuran populasi kecil dan dapat dijangkau oleh peneliti yaitu sebanyak 15 orang.

3.2.5 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

3.2.5.1 Sumber data

Penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti, data tersebut dikelompokan kedalam 2 sumber yaitu:

1. Data Primer

- Kuesioner

Data primer disini sebagai data yang diperoleh secara langsung dari hasil olah penelitian yaitu penyebaran kuesioner kepada beberapa pegawai Samsat Tasikmalaya dan setiap objek diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang telah ditentukan.

2. Data Sekunder

- Dokumen-dokumen instansi

Data sekunder disini adalah dengan meminta Data-data yang sudah diolah atau ada sebelumnya oleh istansi tersebut

3.2.5.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Untuk memperoleh jawaban dari responden, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode kuesioner dengan sistem tertutup, artinya setiap pertanyaan telah disediakan jawabannya.

3.2.6 Teknik Pengujian Data

3.2.6.1 Uji Validitas

Menurut Bambang S.Soedibjo (2005:74) validitas dapat diartikan sebagai ukuran empiris yang mencerminkan arti yang sebenarnya dari konsep yang sedang dipelajari.

Untuk melihat sampai berapa besar validitas dari hasil penelitian maka dilakukan uji validitas konstruk. Validitas isi dilakukan dengan analisis item dimana skor butir dikorelasikan dengan skor total, dalam uji ini akan dilihat samapai berapa kuat keterkaitan antara indikator yang menerangkan variabel yang dibentuknya. Analisis yang digunakan untuk mengkorelasikan tiap butir instrument adalah dengan menggunakan *korelasi product moment* antara setiap item dalam sebuah variabel (X_i) dengan jumlah skornya dalam variabel tersebut (Y_i) melalui rumus (Bambang S.Soedibjo 2005:68)

$$r_i = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i\, y_i - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{\sqrt{\{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2\}\{n\sum^{n}{}_{\neg 1=1}\, y_i^2 - (\sum_{i=1}^{n} y_i)^2\}}}$$

Dimana :

X*i* : skor setiap item ke-I dalam variable-*i*

Y*i* : adalah jumlah skor total

i, n : jumlah responden

Apabila koefisien korelasi yang diperoleh dari rumus diatas adalah positif dan lebih besar atau sama dengan 0,3 maka dapat dikatakan bahwa variabel yang diteliti merupakan konstruk yang kuat dengan perkataan lain bahwa instrument yang digunakan memiliki validitas konstruksi yang baik Sugiyono (2008:188).

Hasil pengolahan SPSS versi 12 menghasilkan tabel berikut :

Tabel 3.3

Uji Validitas butir variabel X dan Y

Variabel	Butir	Korelasi	Keterangan
SI Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (X)	1	0.848	Valid
	2	0.883	Valid
	3	0.392	Valid
	4	0.736	Valid
	5	0.720	Valid
	6	0.904	Valid
	7	0.794	Valid
Kinerja Pegawai (Y)	1	0.821	Valid
	2	0.811	Valid
	3	0.862	Valid
	4	0.665	Valid
	5	0.805	Valid
	6	0.791	Valid
	7	0.803	Valid
	8	0.728	Valid
	9	0.749	Valid
	10	0.521	Valid
	11	0.799	Valid
	12	0.842	Valid
	13	0.804	Valid
	14	0.812	Valid

Sumber : hasil pengolahan data primer (2010)

Dari tabel di atas terlihat dari seluruh pertanyaan yang diberikan kepada responden bersifat valid oleh karena itu tidak ada skor pertanyaan yang dibuang.

3.2.6.2 Uji Relibilitas

Uji relibilitas instrumen dilakukan untuk melihat sampai seberapa besar keandalan alat ukur yang digunakan. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah α-cronbach. Alasan penggunaan rumus ini adalah karena merupakan salah satu uji yang menghasilkan indeks yang cukup sempurna (Sekaran dalam Bambang S.Soedibjo, 2005:72). Adapun rumus yang digunakan adalah

$$\propto = \frac{k}{k-1}\left[1 - \frac{\sum V_i}{V_t}\right]$$

Dimana

k = Jumlah butir pertanyaan atau jumlah saoal atau jumlah pertanyaan

V_t = Varians total butir

$\sum V_i$ = Jumlah varians butir ke -i

Menurut sekaran dalam Bambang S.Soedibjo (2005:72), kriteria penilaian terhadap koefisien α-Cronbach adalah jika koefisien α kurang dari 0,6 maka instrumen dikatakan kurang reliabel, jika diatanra 0,6 dan 0,8 dikatakan cukup reliabel, sedangkan jika α lebih besar 0,8 maka instrumen dikatakan sangat reliabel.

Hasil pengolahan SPSS versi 12 menghasilkan tabel berikut :

Tabel 3.4

Uji Relibilitas Instrumen untuk variabel X dan Y

Variabel	Dimensi	α-Cronbach	Keterangan
SI Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (X)	Keakuratan (X1)	0.742	Reliabel
	Kehandalan (X2)	0,797	Reliabel
	Keamanan (X3)	-	-
Kinerja Pegawai (Y)	Kualitas (YI)	0.879	Reliabel
	Kuantitas (Y2)	0.632	Reliabel
	Konsistensi (Y3)	0.551	Kurang Reliabel
	Tanggung Jawab (Y4)	0.469	Kurang Reliabel

Sumber : hasil pengolahan data primer (2010)

Dari tabel di atas tampak bahwa instrumen untuk variabel Sistem Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor umumnya reliabel tetapi untuk dimensi keamanan tidak ada α-Cronbach disebabkan jumlah pertanyaanya kurang. Sedangkan untuk variabel kinerja pegawai umumnya reliabel, kecuali untuk dimensi konsistensi, dimensi tanggung jawab. Hal ini disebabkan responden tidak konsistensi dalam menjawab pertanyaan.

3.2.7 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan Asosiatif Metode deskriptif digunakan untuk manggambarkan tentang ciri-ciri responden, mengidentifikasi rata-rata dan kecendrungan jawaban responden terhadap pernyataan mengenai Sistem Informasi Pembayaran pajak kendaraan dan Kinerja

pegawai. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengukur kedua variabel antara Sistem Informasi Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan Kinerja pegawai Samsat Tasikmalaya dan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji statistik yang relevan.

Pengujian asosiatif digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan antara variabel X dan variabel Y, dalam hal ini Pengaruh Sistem informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kinerja pegawai.

Sedangkan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Sistem Informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan Kinerja pegawai atau tidak. Jika ada seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan Sistem Informasi pembayaran pajak kendaraan terhadap Kinerja pegawai apakah signifikan atau tidak.

Adapun hipotesis yang akan diteliti sesuai dengan judul yaitu :

H0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Sistem Informasi pembayaran pajak kendaraan dengan Kinerja pegawai.

H1 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Sistem Informasi

Pembayaran pajak kendaraan dengan Kinerja pegawai.

3.2.7.1 Analisis Deskriptif

Menurut sugiyono (2008:1) metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunkan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah ekperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generilasasi.

Statistik deskriptif berisikan perhitungan-perhitungan untuk melihat bagaimana pola atau karakteristik data serta mendeteksi ketidak wajaran responden dalam menjawab kuisioner. Selain perhitungan disarankan pula untuk meringkas hasil-hasil dalam bentuk tabel atau secara visual untuk membantu pemakaian memahami apa yang dihasilakan dari peneliti (Bambang S.Soedibjo (2005:117)

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Setiap indikator / sub variabel yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan ke dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban. Peringkat jawaban seriap indikator diberi skor antara 1 sampai dengan 5.
2. Dihitung total skor setiap variabel / sub variabel = jumlah skor dari seluruh skor indikator variabel untuk semua responden.
3. Dihitung skor setiap variabel / sub variabel = rata-rata dari total skor.

4. Untuk mendeskripsikan jawaban responden juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik dengan menggunakan bantuan software Excell dan SPSS ver.12

3.2.7.2 Analisis Asosiatif

Analsis Asosiatif, pada dasarnya untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel. Pengujian hipotesis digunakan dalam variabel X terhadap variabel Y yang diteliti, dalam hal ini pengaruh sistem informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap kinerja pegawai Samsat di Tasikmalaya.

a. Korelasi

Anlisis korelasi adalah suatu teknik antara variable bebas dengan variabel-variabel terikat.korelasi digunakan untuk melihat kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas (sistem informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor) dan variabel terikat (kinerja pegawai Samsat Tasikmalaya) Rumus yang digunakan korelasi Pearson:

$$r = \frac{n\sum x\ y - \left(\sum x\right)\left(\sum y\right)}{\sqrt{\left\{n\sum x^2 - \left(\sum x\right)^2\right\}\left\{n\sum y^2 - \left(\sum y\right)^2\right\}}}$$

Dimana :

X : jumlah skor total

Y*i* : jumlah skor total

n : jumlah responden

Untuk melihat seberapa besar derajat hubungan yang dihasilkan dari rumus diatas, maka digunakan criteria Champion (Bambang S.Soedibjo, 2005:141)

Tabel 3.5

Kriteria keeratan koefisien korelasi Champpion

Koefisien korelasi	Derajat Hubungan
± 0,00 – 0,25	Tidak ada hubungan atau hubungan yang sangat lemah
± 0,26 – 0,50	Hubungan cukup lemah
± 0,51 – 0,75	Hubungan yang cukup kuat
± 0,76 – 1.00	Hubungan sangat kuat

3.2.7.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa besar persentase pengaruh Sistem Informasi Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan Kinerja Pegawai Samsat Tasikmalaya. Rumus untuk menghitung determinasi menurut Jonathan Sarwono (2004:48) :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi Pearson

Pengaruh tinggi rendahnya koefsien determinasi tersebut digunakan pedoman yang digunakan oleh Guilford yang dikutip oleh Supranto (2001:227) sebagai berikut :

Tabel 3.6

Tinggi Rendahnya Koefisien Determinasi

Pertanyaan	Keterangan
< 4%	Pengaruh Rendah Sekali
5%-16%	Pengaruh Rendah tapi Pasti
17%-49%	Pengaruh Cukup Berarti
50%-81%	Pengaruh Tinggi/Kuat
> 80%	Pengaruh Tinggi Sekali

3.2.7.4 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis bahwa sistem informasi pembayaran pajak kendaraan berpengauh terhadap kinerja pegawai Samsat Tasikmalaya. Rumus yang digunakan adalah (Siegel dalam Bambang S.Soedibjo, 2005:154)

$$t = r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-r_s^2}}$$

Keterangan :

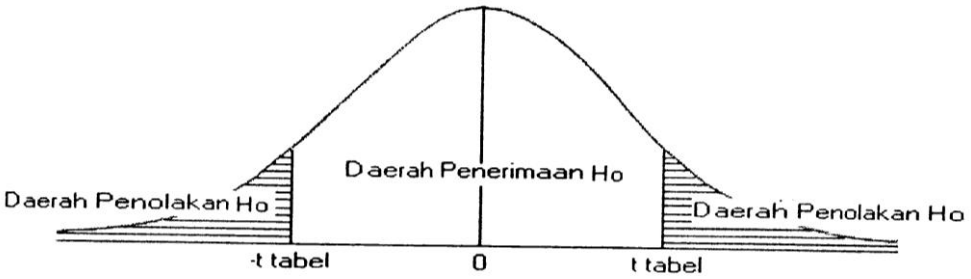
T = Statistik uji korelasi

r = Koefisien korelasi range spearman

n = jumlah atau objek (responden) yang diamati dengan tingkat keyakinan 90% pada tingkat signifikan 10% dan derajat kebebasan n-2.

Hasil uji ini lalu dibandingkan dengan harga kritis “t” dari tabel dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel,}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada hubungan antara sitem informasi pembayaran pajak kendaraan dengan kinerja pegawai
2. Jika $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} \geq t_{tabel,}$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya ada hubungan antara sitem informasi pembayaran pajak kendaraan dengan kinerja pegawai.



Gambar 3.2

Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis